

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas keseluruhan upaya demokratisasi yang dilakukan oleh junta militer Myanmar, tidak lain karena adanya pengaruh dari internal dan juga eksternal yang begitu besar. Pengaruh internal mulai dengan munculnya krisis ekonomi di Myanmar yang telah menyebabkan masyarakat hidup dalam keterbelakangan sosial (kemiskinan). Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa telah terjadi kegagalan pemerintah dalam mengatasi persoalan kebutuhan mendasar bagi rakyatnya, antara lain kegagalan pemerintah dalam mempertahankan tingkat kemakmuran rakyat, dan juga adanya dominasi militer dalam pemerintahan dengan kebijakan-kebijakan represifnya yang pada akhirnya menyebabkan Myanmar masuk kedalam kategori negara yang paling buruk dalam penegakan demokratisasi se-Asia Tenggara. Tuntutan-tuntutan mengenai terwujudnya sistem pemerintahan yang demokratis di Myanmar tidak hanya muncul dari kelompok masyarakat prodemokrasi, namun juga dari lembaga keuangan internasional dan negara-negara lain yang melakukan hubungan kerjasama dengan Myanmar.

Myanmar terlalu lama dikendalikan oleh pemerintahan junta militer yang otoriter dan sentralistik, serta cara-cara kekerasan yang dilakukan pemerintahan menyebabkan semakin menguatnya kelompok oposisi dalam melakukan aksi pemberontakan, salah satunya adalah partai NLD bentukan Aung San Suu Kyi, seorang tokoh prodemokrasi yang paling kuat menyuarakan demokrasi di

Myanmar. Beban permasalahan juga semakin bertambah ketika negara-negara donor dan juga lembaga keuangan internasional melakukan penutupan pinjaman keuangan terhadap Myanmar. Setaip aksi yang dilakukan junta militer terkait pelanggaran demokrasi dan hak asasi manusia, telah memunculkan respon dunia internasional untuk bergerak lebih cepat menekan tindak kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah junta militer.

Berlarut-larutnya masalah internal Myanmar tidak hanya memberikan dampak terhadap domestik negara itu saja, namun juga telah berdampak paa regional ASEAN bahkan internasional. Keadaan inilah yang memicu Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN untuk ikut serta membantu prosos demokratisasi di Myanmar. Selain mendapatkan dorongan dari dunia internasional untuk membantu menyelesaikan permasalahan di negara tersebut, indonesia yang juga sukses melewati proses transisi demokrasi pada tahun 1998 juga mulai membawa isu demokrasi dalam forum regional maupun internasional sebagai solusi atas permasalahan global.

Pada dasarnya demokrasi bukanlah suatu hal yang bisa dipaksakan dari luar. Demokrasi perlu disesuaikan dengan nilai-nilai lokal masyarakat di negara tersebut. Inilah yang menjadi peluang bagi Indonesia melalui *the Institute for Peace and Democracy* dalam mencari dan menemukan cara-cara penerapan demokrasi yang sesuai bagi negara-negara dengan kultur budaya dan norma-norma hidup yang berbeda-beda. Proses diskusi dan berbagi pengalaman ini juga memungkinkan terjadinya interaksi lebih jauh diantara para peserta yang berasal dari berbagai negara yang berbeda, sehingga proses pengenalan dan penyamaan persepsi dapat berlangsung secara lebih mendalam.

Dalam hal ini, Indonesia melalui IPD bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat sipil Myanmar dalam merancang dan melaksanakan program pengembangan peningkatan kapasitas di negara tersebut. Perwakilan dari Myanmar telah mengikuti berbagai kegiatan seperti workshop kepemimpinan dan reformasi partai politik yang diselenggarakan IPD. Selain itu IPD juga cukup aktif memberikan training bagi para anggota Komisi Pemilihan Umum Myanmar. IPD juga melakukan kunjungan dan kerjasama dengan pemerintah Myanmar. Dalam kunjungan tersebut juga dibahas mengenai kerjasama yang lebih konkrit sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap transformasi sistem pemerintahan Myanmar, termasuk memajukan peran IPD untuk membantu *capacity building* institusi terkait di Myanmar. Salah satu peninjauan yang dilakukan adalah menjadikan *School of Peace, Democracy and Development*, yang berada dibawah naungan *Myanmar Development and Research Institute* (MDRI) sebagai *counterpart* dari IPD.

IPD merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia sebagai wujud partisipasi Indonesia dalam memajukan demokrasi di wilayah ASEAN pada khususnya, dan Asia Pasifik pada umumnya. Sebagai negara yang dianggap berhasil dalam memajukan demokrasi, Indonesia merasa perlu dalam berbagi pengalaman, namun sekaligus juga mengambil pelajaran dari negara-negara lain yang sedang maupun telah berhasil dalam transisi menuju negara yang lebih demokratis.

5.2. SARAN

Dari penjelasan diatas, saran yang dapat peneliti sampaikan kepada pemerintah Indonesia adalah perlunya peningkatan upaya yang lebih banyak lagi dalam mendampingi demokratisasi yang tengah terjadi di Myanmar. Terutama kegiatan yang bisa memberikan edukasi langsung terhadap pemerintah dan juga masyarakat Myanmar mengenai dampak positif yang akan diperoleh ketika sistem pemerintahan yang demokratis diterapkan. Tentunya tidak hanya pada aspek dampak positif saja, tetapi juga pada kemungkinan dampak negatif yang mungkin akan terjadi dan bagaimana bentuk tindakan antisipasi dari hal tersebut.

Selain itu terhadap publikasi mengenai upaya yang dilakukan oleh Indonesia mengenai penyebaran nilai-nilai demokrasi di Asia Pasifik secara umum, dan di Myanmar secara khususnya agar lebih ditingkatkan lagi. Sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dan pembelajaran baik bagi negara lain dan juga bagi peneliti dalam bidang demokrasi.

